



ayo turun tangan!

ANIES BASWEDAN 2014

www.aniesbaswedan.com

INDONESIA

1945

1 Semangat 9 Pekerjaan 4 Janji Kemerdekaan 5 Tahun

INDONES

1944

SIA 5

Daftar Isi

1	9 Pekerjaan untuk Melunasi Janji Kemerdekaan
3	1. Indonesia Merdeka
5	2. Indonesia Beradab
6	3. Indonesia Sejahtera
7	4. Indonesia Adil dan Makmur
10	5. Indonesia Cerdas
13	6. Indonesia Sehat
14	7. Indonesia Erat
15	8. Indonesia Bermartabat
16	9. Indonesia Gotong Royong
17	Bagaimana Mewujudkannya?
19	Panggilan Bergerak

9 Pekerjaan untuk Melunasi Janji Kemerdekaan

"...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia..."

- Pembukaan Undang Undang Dasar 1945

Kemerdekaan diproklamasikan tidak hanya untuk menggulung penjajahan, tapi juga untuk membentangkan harapan bernama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia hadir dengan membawa janji kemerdekaan bagi semua. Indonesia adalah Indonesia kita semua.

Indonesia harus menjadi Indonesia kita semua: Indonesia yang mampu melunasi janji kemerdekaan, mulai dari perlindungan, kesejahteraan, hingga pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Indonesia yang melunasi janji kemerdekaan kepada seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke, laki-laki maupun perempuan, pengusaha, buruh, petani maupun nelayan. Tak penting di mana anda dilahirkan: di kaki Tambora, di tepian pulau Sangihe, di dalam kehangatan Boven Digoel, di tengah semilir angin Mentawai ataupun di tengah gemerlap metropolitan Jakarta dan Surabaya, semua warga negara Indonesia harus merasakan bahwa janji kemerdekaan itu telah terlunasi. Indonesia kita semua ada tidak hanya untuk kita yang hidup hari ini, tapi juga untuk anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita.

Janji itu menegaskan bahwa Indonesia kita semua harus menjadi Indonesia yang kuat: aman berdaulat, adil makmur, mandiri dan bermartabat.

Kita memiliki semua modal untuk menjadi bangsa yang besar, sebagaimana kita juga memiliki kemungkinan untuk membuang semua modal itu dan menjadikannya sia-sia. Tahun ini adalah tahun yang akan sangat menentukan apakah janji yang diikrarkan ketika Republik ini didirikan akan mampu kita raih atukah ia hanya akan menjadi ingatan pedih.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan dua hal penting. Yang pertama adalah 9 pekerjaan strategis untuk melunasi 4 janji kemerdekaan yang harus dilakukan dalam 5 tahun (periode 2015-2019).

Di dalam 9 pekerjaan tersebut, terhimpun sejumlah program dan kebijakan yang ditujukan untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang kita cita-citakan: merdeka, beradab, sejahtera, cerdas, giat berusaha dan bekerja, sehat, terhubung erat, bermartabat, dan bergotong royong. Untuk inilah kita bernegara dan berpolitik.

9 Pekerjaan ini adalah pekerjaan-pekerjaan besar yang harus kita upayakan bersama-sama. Pemimpin harus memberikan arah dan prioritas yang jelas, namun pekerjaan-pekerjaan itu hanya dapat kita lakukan jika semua komponen bangsa ini turun tangan.

Yang kedua, penting untuk mengingat bahwa pada tahun 1945 Republik ini berdiri melalui iuran kolosal seluruh rakyat Indonesia, termasuk harta, keringat dan bahkan nyawa.

Hari ini, lebih dari separuh abad setelahnya, kita harus menyadari bahwa Republik ini hanya dapat terus tegak jika ditopang oleh iuran perjuangan dari kita semua. APBN adalah sumbangan dari kita semua, dan hanya dapat kembali kepada kita semua, seluruh rakyat Indonesia, jika kita mengelolanya dengan baik.

Dalam konteks inilah saya akan memaparkan bagaimana kita dapat mengelola anggaran negara untuk melaksanakan langkah-langkah strategis tersebut. APBN tidak boleh hanya dilihat sebagai kumpulan angka-angka mati yang menjadi urusan para pejabat. APBN, yang dalam periode 2015-2019 diperkirakan sejumlah 12.000 trilyun adalah urusan kita semua. Mengelola APBN dengan baik adalah jalan kita untuk mewujudkan Indonesia yang kuat. Banyak hal yang dianggap tidak mungkin dilaksanakan karena “keterbatasan dana” ternyata dapat dilaksanakan jika kita dapat melakukan berbagai langkah perbaikan dalam mengelola APBN. APBN adalah alat kita untuk menggerakkan seluruh kekayaan tanah air kita demi melunasi janji kemerdekaan, untuk seluruh warga negara Indonesia.

1. Indonesia Merdeka

Indonesia kita semua harus menjadi Indonesia yang seluruh warga negaranya merdeka.

Pekerjaan pertama adalah kumpulan inisiatif untuk menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia merdeka. Merdeka dari rasa takut. Merdeka dari kelaparan. Merdeka dari ancaman, baik dari luar maupun dalam, termasuk dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan negara. Inilah yang terkandung di dalam janji kemerdekaan yang pertama: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Beberapa pekerjaan penting yang harus kita lakukan untuk itu adalah:

1) Modernisasi alutsista sesuai dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan, diiringi dengan upaya meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan prajurit.

Secara geostrategis, Indonesia adalah negara kepulauan yang **memiliki empat Sea-Lane of Communication (SLOCs) yang sangat strategis**: Selat Malaka, Selat Sunda/Karimata (Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI I), Selat Lombok/Selat Makassar/Selat Sulawesi (ALKI II), serta Selat Ombai/Wetar/Laut Banda (ALKI III A, III B, IIIC). Belum lagi **potensi kekayaan laut Indonesia yang luar biasa**, yang harus dijaga dari kejahatan. Kita juga harus mengelola perbatasan-perbatasan kita di darat, laut dan udara dengan baik. Untuk itu, **sistem pertahanan kita harus mempertimbangkan karakter khas Indonesia** tersebut. Tentara Nasional Indonesia harus memiliki persenjataan yang memadai, ditopang oleh prajurit-prajurit yang terjamin kesejahteraannya.

2) Membangun ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi pertanian.

Untuk itu, ada tiga cara yang harus ditempuh. Cara pertama adalah **percepatan pembangunan infrastruktur penunjang produksi maupun distribusi produk pertanian**. Kita harus membangun agro-industry dan agro-related industry. Kedua, melakukan **intensifikasi di lahan yang produktif dan melakukan ekstensifikasi di 8 juta lahan lahan menganggur di Indonesia**. Ketiga, **mewujudkan klaster pertanian yang komprehensif**, yang meliputi areal produksi, perumahan petani, pusat pendidikan petani yang terkoneksi dengan pasar atau rantai distribusi produk pertanian.

3) Membangun kembali modal sosial kita dengan mendorong tumbuhnya nasionalisme, semangat berbagi dan semangat kesukarelawanan.

Satu inisiatif yang dapat dilakukan adalah program subsidi silang sukarela BPJS, **program “Tenun Kebangsaan”**, semacam pertukaran Pemuda antar daerah di Indonesia untuk lebih saling mengenal tanah air dengan baik, serta **“Gerakan Relawan Semesta.”**

4) Membangun ketahanan energi.

Rakyat Indonesia membutuhkan energi untuk membangun. **Untuk memastikan masa depan ketahanan energi, kita harus mengembangkan setidaknya tiga energi alternatif selain minyak bumi, yaitu batubara, gas dan panas bumi.**

Batubara dan panas bumi adalah masa depan energi listrik di Indonesia. Batubara merupakan sumber salah satu sumber energi termurah untuk menciptakan listrik. Kedepannya **pengembangan PLTU harus berbasiskan dengan teknologi clean coal dan menggunakan spesifikasi supercritical coal power plant** agar produksi energi lebih bersih, bahkan hasil emisi tersebut bisa dimanfaatkan menjadi batubata seperti di Jepang.

Mengembangkan panas bumi butuh komitmen yang kuat. Komitmen pertama terkait pembebasan lahan dan kedua terkait peningkatan kelayakan investasi. **Bentuk komitmen dalam pembebasan lahan adalah melakukan sinergi atas peta kehutanan dan pertambangan, dimana selama ini membuat tumpang tindih.** Komitmen untuk **meningkatkan kelayakan investasi harus ditunjukkan dengan memperkuat skema geothermal fund dengan menambahkan jumlah anggaran sesuai dengan keperluan.**

Gas sangat vital bagi rakyat, karena dibutuhkan sebagai sumber bahan baku pembuatan pupuk dan sumber energi industri. **Pengembangan gas selama ini selalu terhambat pada infrastrukturnya.** Untuk itu perlu dipercepat proses pembangunan infrastruktur gas karena masih banyak daerah yang belum tersambung dengan jaringan pipa gas.

2. Indonesia Beradab

Indonesia kita semua harus menjadi Indonesia yang ditopang oleh warga negara yang beradab.

Setelah reformasi, kita mendapatkan nikmat kebebasan. Supaya tidak menjerumuskan kita pada kehancuran, nikmat kebebasan ini harus dibarengi dengan keadaban. Salah satu kuncinya adalah penegakan hukum. Hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas adalah resep utama kehancuran sebuah negara.

Inisiatif penting yang dilakukan untuk itu adalah :

1) Reformasi penegakan hukum dan memenangkan pemberantasan korupsi dengan memfokuskan KPK untuk mengawasi dan menindak korupsi di hulu.

Untuk itu, reformasi penegakan hukum harus dikerjakan bersamaan dengan upaya memenangkan pemberantasan korupsi, yaitu dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi dan memfokuskannya ke hulu, yaitu institusi pembuat hukum (DPR) dan penegak hukum.

2) Presiden harus turun tangan berpihak pada pemberantasan korupsi secara aktif.

Pemberantasan korupsi membutuhkan kemauan politik dan dukungan politik yang tidak tergoyahkan.

3. Indonesia Sejahtera

Indonesia kita semua harus menjadi Indonesia yang seluruh warga negaranya terjamin kesejahteraannya.

Pekerjaan ketiga adalah kumpulan inisiatif yang ditujukan untuk mewujudkan Indonesia yang seluruh warga negaranya sejahtera. Indonesia yang kuat harus memberikan perlindungan sosial yang utuh bagi seluruh rakyatnya.

1 Januari 2014 adalah salah satu tonggak bersejarah bagi masyarakat Indonesia, dengan mulai beroperasinya BPJS 1 yang mengelola asuransi kesehatan sosial. Pada tahun 2014 ini ditargetkan sekitar 121 juta penduduk Indonesia akan tercakup dalam berbagai asuransi kesehatan dan pada tahun 2019 ditargetkan akan tercapai universal coverage. BPJS 2, BPJS Ketenagakerjaan, akan menyusul beroperasi pada Juli 2015. BPJS 2 ini akan mengelola berbagai santunan yang terkait dengan kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja dan lainnya. Tentu saja, ini adalah pencapaian penting yang harus disyukuri. Di sisi lain, kita dapat membuatnya menjadi lebih baik lagi.

BPJS 1 dan 2 baru merupakan sebagian komponen dari sebuah Sistem Perlindungan Sosial (SPS) yaitu komponen Asuransi Sosial dari SPS. Kita harus membangun dua komponen lainnya:
Intervensi Ketenagakerjaan dan Bantuan Sosial.

Ruang peningkatan lainnya yang perlu diupayakan dalam pengembangan SPS adalah peningkatan alokasi anggaran SPS. Angka pengeluaran bantuan/perlindungan sosial kita juga jauh lebih rendah dari negara-negara tetangga.

Alokasi bantuan sosial di Indonesia pada tahun 2011-2012 hanya 1.5% dari GDP. Angka ini jauh di bawah yang dialokasikan di Malaysia (3.4%), Vietnam (4.3%), China (5.1%) dan Korea Selatan (7.7%).

4. Indonesia Adil dan Makmur

Indonesia kita semua harus menjadi Indonesia yang seluruh warga negaranya dapat bekerja dan berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur

Pekerjaan keempat adalah kumpulan inisiatif yang ditujukan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, yang di dalamnya seluruh warga negara memiliki pekerjaan yang layak.

Prestasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan yang baik. **Seluruh wilayah di Indonesia harus tumbuh bersama sesuai dengan potensi masing-masing.** Negara harus menjamin bahwa setiap rakyat Indonesia memiliki pekerjaan yang layak. Inilah yang tegas tercantum di dalam janji kemerdekaan yang kedua yang menjadi alasan kenapa negara ini berdiri dan kenapa kita semua berpolitik: **"Memajukan kesejahteraan umum."**

Beberapa pekerjaan penting yang harus kita lakukan untuk itu adalah:

1) Menciptakan lapangan pekerjaan.

Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 6,25%. Hal ini harus diatasi. Langkah pertama adalah dengan **menciptakan link and match antara kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama Pemerintah-Swasta dengan mengelola dana link and match tersebut (matching fund).** Dengan menggunakan dana tersebut, kita akan mendirikan pusat-pusat pelatihan dan sertifikasi di daerah yang membutuhkan. Diharapkan, melalui pusat pelatihan dan sertifikasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas tenaga kerja Indonesia dan dapat menyesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha. **Langkah penting lainnya adalah dengan memperbanyak program padat karya.**

2) Kita harus konsisten mendorong hilirisasi industri, khususnya hasil tambang mineral.

Selain memberikan dampak ekonomi, seperti penciptaan tenaga kerja dan meningkatkan ekspor, kebijakan ini melengkapi rantai nilai industri yang selama ini hilang. **Selama ini pelaku industri Indonesia yang membutuhkan almunium sebagai bahan baku harus mengimpor komoditas tersebut sebanyak 700.000 ton/tahun, padahal setiap tahunnya negara mengekspor 16 juta ton bauksit.** Hal tersebut menyebabkan industri Indonesia menjadi tidak kompetitif dan selalu terancam resiko kurs. Oleh sebab itu, pembangunan smelter di Indonesia merupakan kewajiban. Guna mempercepat pembangunan smelter sudah seharusnya kita mendorong penciptaan Kawasan Ekonomi Khusus untuk smelter. Melalui pendekatan ini, maka pembangunan smelter akan terzonasi pada kawasan-kawasan tertentu, sehingga pembangunan infrastruktur, seperti listrik, jalan dan pelabuhan, dapat tersentralisasi dan lebih mudah dilaksanakan.

3) Pemindahan BUMN ke daerah.

Merelokasi beberapa BUMN strategis akan membuat perputaran uang di daerah semakin besar dan menghilangkan ketimpangan perputaran uang. Selama ini, 52% dana pihak ketiga (DPK) perbankan nasional berasal dari Jakarta dan sisa 48% dibagi ke 32 Provinsi. Memindahkan BUMN ke daerah, berarti memindahkan operasional, manajemen, hingga pencatatan aset ke daerah. Hal ini akan menciptakan pembangunan yang lebih adil bagi berbagai wilayah di Indonesia. **Sebagai contoh, jika satu BUMN dalam bidang konstruksi dipindah ke Indonesia Timur dengan misi membangun Indonesia Timur, tentu dampaknya akan besar untuk pembangunan kawasan tersebut.**

4) Mendorong kesejahteraan petani dengan memberikan dukungan sarana produksi, seperti pupuk dan benih, serta anggaran untuk mendorong pembangunan sistem irigasi yang baik.

Penting untuk memberikan dukungan penuh kepada para petani kita, yang diperkirakan berjumlah sekitar 38 juta orang, untuk menjadi berdaya. Untuk itu, kita harus **meningkatkan kapasitas petani nasional, agar petani memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih untuk mengelola lahannya secara lebih profesional** salah satunya **melalui pembangunan akademi komunitas di sentra-sentra pertanian serta dengan memberikan berbagai dukungan sarana produksi serta irigasi yang baik.** Para petani telah menyambung kehidupan kita semua, maka negara harus melindungi kesinambungan hidup mereka dengan baik.

5) Memperluas akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Saat ini, salah satu kendala yang terus mendorong ketimpangan adalah sulitnya UMKM mendapatkan fasilitas dari sektor keuangan.

Untuk itu enam pilar strategi nasional inklusi keuangan harus diperkuat:

- **Pilar pertama**, edukasi keuangan dapat diperkuat dengan balai-balai diklat tentang financial literacy di daerah-daerah.
- **Pilar kedua**, fasilitas keuangan publik dapat diperkuat dengan menggunakan memperbanyak skema dana bergulir (revolving fund), agar keuangan publik untuk UMKM tidak habis dalam satu tahun anggaran, akan tetapi terus bertambah.
- **Pilar ketiga**, eligibilitas dapat diperkuat melalui memberikan pelatihan pembukuan dan pencatatan laporan keuangan.
- **Pilar keempat**, kebijakan pendukung dapat diperkuat melalui pengembangan IT yang mumpuni guna mendukung berdirinya branchless banking di daerah terpencil.
- **Pilar kelima**, fasilitasi intermediasi, dapat diperkuat dengan menciptakan database yang kuat berbasis E-KTP dan database perbankan OJK.
- **Pilar Keenam**, perlindungan konsumen dapat diperkuat melalui penciptaan transparansi produk dan mendirikan unit yang melaksanakan fungsi mediasi. Selain itu perlu ada affirmative action untuk mendorong alokasi fasilitas keuangan bagi UMKM.

5. Indonesia Cerdas

Indonesia kita semua harus menjadi Indonesia yang seluruh warga negaranya cerdas.

Penempatan pendidikan sebagai salah satu janji kemerdekaan menekankan bahwa janji lainnya, yang meliputi keamanan, ekonomi dan peran internasional, tidak mungkin dapat terwujud tanpa memberikan perhatian yang baik pada pendidikan. Hingga 2 dekade mendatang Indonesia akan memiliki mayoritas penduduk dengan usia produktif. Tentu saja, ini adalah modal bagus untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Meski demikian, hari ini secara rata-rata manusia Indonesia menempuh 6 tahun pendidikan, setara SD.

Dari 10 orang laki-laki hanya 5 yang menempuh pendidikan menengah. Dari 10 perempuan, hanya 3 yang menempuh pendidikan menengah.

Bandingkan di Filipina yang hampir 70 persen penduduknya belajar hingga tingkat menengah. Kualitas pendidikan juga perlu mendapat perhatian serius. Performa siswa Indonesia kalah jauh dibanding Singapore, Malaysia, maupun Thailand (TIMSS, 2007; PISA 2013) sementara itu keterbukaan ASEAN ada di depan mata. Pendidikan adalah eskalator untuk mengantarkan anak bangsa dari segala strata sosial untuk menjadi individu yang mandiri secara sosial dan ekonomi.

Ada beberapa agenda penting yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa 20% anggaran negara yang diwajibkan untuk pendidikan dapat bermanfaat dengan optimal:

1) Meningkatkan kualitas guru dan merekrut putra-putri terbaik untuk menjadi guru.

Inisiatif ini dapat dilakukan melalui program peer coaching serta persiapan intensif guru baru sesuai tingkatan. Kita harus Memproyeksikan kebutuhan guru di tiap tingkatan untuk sekolah negeri dan swasta. Termasuk memproyeksikan rasio yang ideal antara siswa dan guru.

2) Mengembangkan kepemimpinan kepala sekolah di setiap lembaga pendidikan dengan membangun sistem pendidikan kepala sekolah.

Sistem yang dibuat harus dapat menggambarkan dengan jelas uraian tugas pimpinan sekolah, menjamin kepala sekolah terpilih berdasarkan kinerja, serta merancang pelatihan terstruktur dan komprehensif untuk meningkatkan performa sekolah.

3) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pilihan pendidikan tinggi bagi setiap lulusan SMA/SMK yang berpotensi.

Dengan meningkatkan daya tampung pendidikan tinggi untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi serta dukungan pada perguruan tinggi swasta melalui pemberian insentif untuk membangun lebih banyak lagi perguruan tinggi lokal yang berfokus pada bidang praktis.

4) Menjamin ketersediaan sekolah untuk meningkatkan rerata waktu belajar menjadi 12 tahun.

Dengan asumsi 50 % dari 928.000 siswa/tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP, maka perlu dibangun 1500 sekolah dengan kapasitas 100 siswa. Opsi lainnya ialah program konversi guru sekolah dasar ke menengah dengan mengacu pada rasio siswa dan guru.

5) Memastikan setiap anak bisa bersekolah, terutama menyekolahkan anak-anak kurang mampu dengan menggalakkan beasiswa secara agresif.

6) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pilihan pendidikan tinggi bagi setiap lulusan SMA/SMK yang berpotensi.

Dengan meningkatkan daya tampung pendidikan tinggi untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi serta dukungan pada perguruan tinggi swasta melalui pemberian insentif untuk membangun lebih banyak lagi perguruan tinggi lokal yang berfokus pada bidang praktis.

7) Mengupayakan kerja sama antara universitas-universitas di Indonesia untuk mengembangkan inovasi dan riset pada skala besar.

8) Mengupayakan Brain Gain.

Kita harus mengoptimalkan potensi Mahasiswa dan Ilmuwan Indonesia di Luar Negeri melalui mapping, monitoring, dan attracting mahasiswa di seluruh dunia. Selain itu, kita juga dapat menghadirkan para ilmuwan terbaik dunia untuk mendorong kemajuan riset dan inovasi di tanah air.

9) Meningkatkan akuntabilitas sekolah atas kinerja pendidikan siswa.

Dengan mengembangkan sistem manajemen kinerja untuk sekolah dan para guru serta melibatkan masyarakat untuk memiliki sasaran pendidikan di kecamatan atau kelurahan.

10) Menempatkan birokrasi pendidikan sebagai prioritas reformasi birokrasi.

Pemerintah harus menjaga konsistensi dalam implementasi UU 20/2003 terkait anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan, serta meningkatkan kualitas belanja agar mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, kita harus mendorong media dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan memantau kinerja penyelenggara pendidikan pada level kabupaten di tiap provinsi di Indonesia.

11) Membangun Center of Excellence pendidikan di berbagai daerah.

Kebijakan ini dapat dipasangkan dengan kebijakan relokasi BUMN.

6. Indonesia Sehat

Indonesia kita semua harus menjadi Indonesia yang seluruh warga negaranya sehat

Untuk berdaya, Manusia Indonesia yang cerdas juga harus sehat. **Hari ini, antara Jakarta dengan Flores hanya beberapa jam tempuh dengan pesawat terbang, tapi terlampau timpang.** Anak-anak di Ibukota memiliki peluang besar untuk tumbuh besar dalam kasih sayang Ibu sementara anak-anak Flores diliputi bayang-bayang kematian sang Ibu.

Negara tak boleh biarkan, negara harus ambil peran memastikan bahwa tiap Bunda Aceh hingga Mama Merauke memiliki kesempatan untuk melihat anaknya tumbuh besar dan sukses. Bersama pendidikan, kesehatan adalah investasi masa depan.

Untuk itu, ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan:

1) Memperkuat Puskesmas untuk Keadilan Pelayanan Kesehatan.

Di tengah laju pertumbuhan ekonomi, Indonesia justru mengalami kenaikan angka kematian ibu dari 228/100.000 menjadi 359/100.000 kelahiran (SDKI 2012). Angka kematian anak di Indonesia juga mencapai 32/1000 kelahiran, lebih tinggi dibandingkan Thailand yang sudah dibawah 15/1000. Gambaran ini bertumpuk dengan ketimpangan yang mengkhawatirkan, seperti misalnya **hanya 3 dari 10 orang NTT yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang baik, sementara 8 dari 10 penduduk DKI memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang baik.** Untuk memperbaiki kondisi tersebut, kita harus memperkuat PUSKESMAS, baik dari segi jangkauan maupun kualitas pelayanan kesehatan yang disediakannya. Saat ini hanya 47,4% PUSKESMAS yang mampu memberikan pelayanan kandungan dan neonatal essensial (Rifaskes, 2011).

2) Memperkuat Sistem Kesehatan Masyarakat dengan Intervensi Semesta.

Dahulu, penyebab kematian terbanyak disumbangkan oleh penyakit menular seperti malaria, diare, TBC. Sekarang, 63% kematian penduduk disebabkan oleh penyakit tidak menular (WHO, 2011). Munculnya PTM ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, minimnya aktivitas fisik, konsumsi makanan tidak sehat, dsb. Intervensi yang dilakukan perlu 'Semesta' melibatkan sektor lain, seperti penyediaan taman dan fasilitas olahraga umum, ketersediaan transportasi umum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan mendorong aktivitas fisik, serta menyediakan frekuensi khusus untuk Kemenkes dalam sosialisasi layanan masyarakatnya.

7. Indonesia Erat

Indonesia kita semua harus menjadi Indonesia yang seluruh warga negaranya terhubung dengan erat

Indonesia adalah negara besar. Jarak Sabang-Merauke itu sama dengan jarak antara London - Moskow. Luasnya wilayah ini seringkali menyebabkan keterhubungan (konektivitas) antar masyarakat Indonesia menjadi terhambat. Mobilitas manusia dan barang di antara wilayah menjadi pun semakin mahal diakibatkan minimnya infrastruktur penunjang konektivitas ini.

Bahkan menurut sebuah penelitian, jarak antara wilayah Indonesia semakin renggang dibandingkan dengan jarak Indonesia negara lain, jika dilihat dari sisi biaya logistiknya. Hal ini menjadi indikasi bahwa pembangunan infrastruktur masih harus dipercepat.

Menghubungkan setiap anak bangsa yang ada di Indonesia membutuhkan pengembangan infrastruktur yang baik. Pembangunan jalan dan kereta dibutuhkan untuk menghubungkan dua wilayah dalam satu daratan. Pembangunan pelabuhan dan bandara dibutuhkan sebagai sarana mobilitas manusia dan barang secara masif dan cepat antara dua pulau yang berbeda. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi menghilangkan semua batasan jarak tersebut dan membuat rakyat terhubung secara emosional dengan mudah. **Indonesia akan menjadi satu jika terhubung dengan erat oleh konektivitas yang baik.**

Untuk itu, ada satu inisiatif penting yang harus dilakukan: **mewujudkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur**. Guna menunjang pertumbuhan ekonomi di atas 7%, pada periode 2015-2019 Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 2.584 Triliun.

Untuk mewujudkannya, penting untuk mendorong skema Public Private Partnership (PPP). Agar skema PPP ini berjalan dengan optimal, Pemerintah harus memberikan insentif yang tepat. Penting juga untuk menjadikan infrastruktur sebagai salah satu mandatory spending di dalam belanja barang APBN.

8. Indonesia Bermartabat

Indonesia kita semua harus menjadi Indonesia yang bermartabat

Kita harus menjadi Indonesia yang seluruh warganya dengan bangga mengatakan bahwa “Saya orang Indonesia.” Untuk itu, kebijakan luar negeri Indonesia harus ditata dengan baik. Indonesia yang kuat membutuhkan kebijakan luar negeri yang saling mendukung dengan kebijakan domestik. Para pendiri bangsa ini menyadari bahwa nasionalisme Indonesia tumbuh di taman internasionalisme. Indonesia lahir sebagai bagian dari dunia dan bertanggung jawab untuk turut serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan peran internasional Indonesia yang lebih baik dan bermartabat, ada beberapa inisiatif yang harus dilakukan:

1) Memperkuat tautan antara kebijakan domestik dengan kebijakan luar negeri.

Dahulu, Indonesia mendorong UNCLOS melalui Deklarasi Juanda dan memperkenalkan konsep “Archipelagic State.” Hal tersebut mampu dilakukan karena kita membangun politik luar negeri yang bertautan erat dengan kebijakan domestik. Sebagai contoh, seiring dengan agenda pemberantasan korupsi, kita harus mendorong diplomasi pemberantasan dan pencegahan korupsi di level kawasan maupun di level internasional. Salah satu hal penting misalnya adalah melakukan inisiasi Perjanjian Internasional atau di level ASEAN untuk Asset Recovery Korupsi.

2) Memperkuat koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri.

Seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan berbagai kementerian lain yang terkait. Dalam konteks ini, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat Sekretariat ASEAN.

3) Membangun Korps Diplomasi Publik.

Dengan jumlah warga negara, pengusaha, pekerja, dan mahasiswa Indonesia yang besar dan tersebar di seluruh dunia, kita dapat menggerakkan peran mereka untuk mewujudkan diplomasi Indonesia yang lebih baik.

9. Indonesia Gotong Royong

Indonesia kita semua harus menjadi Indonesia yang seluruh warga negaranya bergotong royong

Semua pekerjaan di atas hanya bisa dikerjakan ketika kita semua, seluruh warga negara Indonesia, turun tangan bergotong royong. Karena itu, delapan pekerjaan sebelumnya hanya bisa terwujud jika ada satu pekerjaan yang dapat dilakukan: menggerakkan seluruh komponen bangsa. Tentu saja, ada banyak tantangan untuk melaksanakan delapan pekerjaan sebelumnya, baik berupa tantangan teknis maupun yang berasal dari kehendak politik. Pekerjaan kesembilan ini ditujukan untuk menyatukan visi kita sebagai sebuah bangsa.

Untuk itu, ada beberapa inisiatif penting yang harus dilakukan:

1) Penataan kembali sistem politik dengan penyehatan partai politik.

Presiden harus mengajak semua pimpinan partai untuk duduk bersama melampaui sekat-sekat kepentingan sempit serta membangun komitmen bersama yang adil untuk menyehatkan partai politik.

2) Membangun kesadaran bahwa seluruh komponen harus bekerja sama untuk melunasi janji kemerdekaan.

Inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan harus dilihat tidak sekedar sebagai “program,” tapi sebagai “gerakan bersama,” sehingga dilaksanakan tidak sekedar sebagai pekerjaan. Sebagai contoh, relokasi BUMN akan membutuhkan kesadaran dari para pemimpinnya bahwa BUMN tersebut sedang turut serta turun tangan mewujudkan Indonesia yang lebih adil dengan memindahkan pusat operasinya di daerah.

Bagaimana Mewujudkannya?

Mari Kelola 12.000 Trilyun dengan Baik!

Inisiatif-inisiatif tersebut di atas tentu tidak muncul secara gaib dari ruang hampa. Ada sumber daya yang harus dikelola dengan baik. Saya yakin dan percaya kita memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program-program tersebut jika kita dapat mengelola APBN yang diperkirakan mencapai Rp 12.000 Trilyun dalam lima tahun mendatang. Kita tidak boleh membiarkannya dimanfaatkan dengan tidak bertanggung jawab sehingga mengorbankan masa depan anak-anak kita semua.

Menjelang akhir tahun, lazimnya kita mencatat serapan anggaran tiba-tiba melonjak dengan pesat. Hotel-hotel penuh dengan acara seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian.

Pertanyaannya adalah, apakah pola penyerapan anggaran yang berulang seperti itu setiap tahun adalah pola penyerapan anggaran yang sehat? Saya membayangkan jika kita dapat mengelola APBN dengan lebih baik serta menjauhkannya dari penyalahgunaan kekuasaan, kita dapat membuka jalan untuk melunasi janji kemerdekaan.

Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan APBN yang harus diterapkan:

- **APBN harus mencerminkan visi dari pemimpin.**

Prioritas kebijakan dari Presiden harus tercermin dalam anggaran dan menciptakan dampak yang diharapkan. Hal ini sulit terwujud jika ada kesenjangan antara pemimpin dan para pelaksana kebijakan serta penyusun anggaran. Penting untuk melakukan penguatan unit presiden untuk memastikan bahwa visi ini diterjemahkan sampai di penganggaran teknis serta memastikan kaitan antara rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah.

- **Pengelolaan APBN harus berdasarkan integritas.**

APBN tidak boleh dilihat sebagai sumber dana untuk pembiayaan politik. Presiden harus mengajak duduk bersama seluruh kekuatan politik. Bicara terbuka tentang pengelolaan APBN, sehingga tidak dibicarakan dalam kegelapan sehingga kepentingan publik menjadi yang utama.

- **Efisiensi anggaran.**

Efisiensi belanja barang 5% saja sudah menghemat lebih dari 10 trilyun per tahun. Anggaran sebesar itu dapat menjadi lebih dari 10.000 puskesmas dengan fasilitas yang lengkap! Angka sebesar itu dapat membangun riset dan inovasi yang kuat, yang akan mengantarkan Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman atau Jepang.

- **Penerapan Performance Based Budgeting (Penggangan Berbasis Kinerja).**

Apakah Komisi Pemilihan Umum benar-benar membutuhkan 15,5 trilyun setiap tahun? Apakah BNN membutuhkan 813 milyar per tahun? Memang dananya terserap untuk pasang iklan di mana-mana, tapi apakah iklan-iklan itu efektif untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba? Apakah seminar-seminar yang dilaksanakan di akhir tahun memang benar-benar bermanfaat? Evaluasi berbasis penyerapan anggaran harus direformasi dengan penerapan penggangan berbasis kinerja. Presiden menetapkan target-target kinerja besar yang terukur, yang harus diterjemahkan ke dalam target-target yang terukur pula hingga level teknis (bukan target penyerapan atau pelaksanaan program, tapi target pencapaian).

- **Temporary Mandatory Spending (Mandat Pengeluaran Sementara).**

Untuk memastikan bahwa agenda-agenda besar dapat terwujud, penting untuk memiliki temporary mandatory spending dalam jangka pendek atau menengah, terutama untuk Infrastruktur dan jaminan sosial.

- **Penguatan peran budgeting DPR dengan memperkuat Badan Anggaran dengan staf ahli yang memadai untuk membahas anggaran, sekaligus memfokuskan peran DPR pada tingkat satu (tingkat strategis).**

DPR tidak perlu direpotkan pembahasan hingga tingkat teknis (tingkat 3) yang rawan memicu korupsi. Pada saat yang bersamaan, harus ada staf ahli yang kompeten untuk membahas APBN demi kepentingan rakyat dengan lebih baik.

- **Pembaruan periodisasi APBN dengan membagi APBN menjadi dua komponen, komponen tahunan dan komponen yang berkelanjutan.**

Karena ada inisiatif-inisiatif yang bersifat jangka menengah/panjang, penggangan APBN harus dibuat lebih mengakomodasi inisiatif-inisiatif tersebut. Jangan sampai kita menghambat laju program yang berdampak baik karena periodisasi anggaran. APBN dapat dipisahkan ke dalam dua komponen, yaitu komponen anggaran yang bersifat tahunan dan komponen anggaran yang bersifat berkelanjutan.

Panggilan Bergerak

Indonesia kita semua adalah Indonesia yang harus kita perjuangkan bersama-sama.

Indonesia adalah sebuah gerakan. Indonesia merdeka dengan ditopang oleh iuran perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan itu juga harus diisi dengan iuran perjuangan dari kita semua. Mari kita menangkan masa depan dengan menciptakan politik yang lebih sehat dan beradab. Kita menangkan masa depan dengan mengelola APBN dengan lebih baik.

Jika kejahatan saja dilakukan bersama-sama, mengapa kita ragu bergandeng tangan untuk memperjuangkan kebaikan?

**Mari turun tangan bersama-sama,
mewujudkan Indonesia kita semua!**

1 Semangat, 9 Pekerjaan, 4 Janji kemerdekaan, 5 Tahun!

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Pembukaan UUD 1945



INDONESIA
1945

ayo turun tangan!

ANIES BASWEDAN 2014

www.aniesbaswedan.com